

MODUL 1

PUBLIC SECTOR ACCOUNTING



PUBLIC SECTOR ACCOUNTING : AN INTRODUCTION

Oleh : Muh. Arief Effendi,SE,MSi,Ak,QIA, CPMA

TRISAKTI SCHOOL OF MANAGEMENT
(STIE TRISAKTI) JAKARTA

REVISED EDITION
SEPTEMBER 2012

OUTLINE / SILABUS COURSE



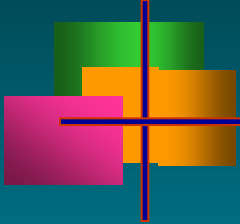
- PUBLIC SECTOR ACCOUNTING : THE HISTORICAL PERSPECTIVE
- STATE FINANCE REFORMATION IN INDONESIA.
- PUBLIC SECTOR ACCOUNTING & GOOD GOVERNANCE.
- ACCOUNTABILITY & VALUE FOR MONEY
- DEFINITION & SCOPE OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING
- THE NATURE & CHARACTERISTICS OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING
- PUBLIC SECTOR ENVIRONMENT
- SIMILARITIES & DIFFERENCES IN PUBLIC & PRIVATE SECTOR (COMMERCIAL).

PUBLIC SECTOR ACCOUNTING : THE HISTORICAL PERSPECTIVE



1. 1950 → PBB menerbitkan publikasi dalam bidang akuntansi, auditing dan pemerintahan.
2. 1952 → Istilah sektor publik, diperkenalkan.
3. Sering dikaitkan dengan bagian manajemen ekonomi makro
4. 1970 → Kritikan terhadap sektor publik, tidak efisien dan tidak mendukung pembangunan.
5. 1980 → Reformasi Sektor Publik di Negara Industri. Basis kas ke Basis Akrua.
6. 1981 → Kanada : membentuk the publik sector accounting and auditing.
7. 1982 → Accounting Research And Standar Board (ARSB) → menerbitkan pelaporan keuangan sektor publik (Public Sector Financial Reporting).
8. 1983 → Inggris dan australia mengembangkan pelaporan utk sektor publik
9. 1984 → Amerika membentuk GASB untuk membentuk standar akuntansi pemerintah
10. Di Indonesia → Standar akuntansi pemerintah baru dikeluarkan tahun 2005 (PP 24 2005) oleh KSAP
11. Th 2010 dikeluarkan PP 71 tentang SAP berbasis akrual (Accrual Basis).

STATE FINANCE REFORMATION IN INDONESIA



Sebelum era Reformasi, peran Akuntansi Sektor Publik di Indonesia dinilai kurang berkembang. Akibatnya sektor publik menjadi kurang efisien dan jauh tertinggal dari sektor privat (swasta). Setelah era reformasi tuntutan peningkatan kinerja sektor publik semakin berorientasi pada terciptanya "*good public and corporate governance*", karena sektor publik memiliki peran strategis dalam perwujudannya.

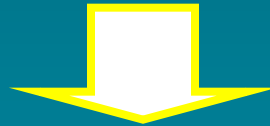
Paket Reformasi keuangan negara / Standar Akuntansi keuangan di Indonesia antara lain :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. UU no. 25 tahun 2004 tentang Pembangunan Jangka panjang.
5. UU No. 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. PP No 24 tahun 25 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi non Laba.

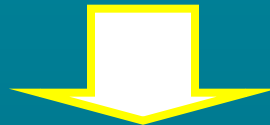
STATE FINANCE REFORMATION IN INDONESIA

REFORMASI POLITIK (1998)

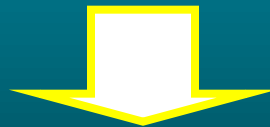
Tuntutan Clean Governance, Transparence dan Public Accountability



REFORMASI EKONOMI

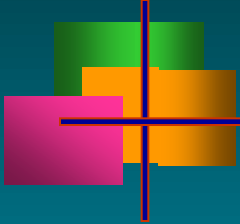


REFORMASI MANAJEMEN
KEUANGAN NEGARA

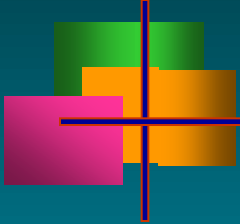


REFORMASI AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

PUBLIC SECTOR ACCOUNTING & GOOD GOVERNANCE

- 
-
- **Good governance** : cara mengelola urusan publik atau pemerintahan yang baik.
 - **World Bank** : lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber dayasosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.
 - **UNDP** : lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara.
 1. **Political governance** : proses pembuatan kebijakan.
 2. **Economic governance** : proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi kepada pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.
 3. **Administrative governance** : sistem implementasi kebijakan.
 - **Sektor publik** untuk menciptakan Good governance.

PUBLIC ACCOUNTABILITY



Akuntabilitas Publik Adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi taggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal : akuntabilitas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Akuntabilitas Horisontal : pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat kepada masyarakat luas.

Terdapat 4 Akuntabilitas publik menurut Elwood dalam Mardiasmo (2009) , yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*Probity & legality accountability*).
2. Akuntabilitas Proses (*Process accountability*).
3. Akuntabilitas Program (*Program accountability*).
4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy accountability*).



VALUE FOR MONEY (VFM)

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value for money (VFM) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama (3 primary elements) , yaitu :

1. Ekonomi (Economic) : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah.
2. Efisiensi (Efficiency) : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
3. Efektivitas (Effectiveness) : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan output.



VALUE FOR MONEY (VFM)

Selain ketiga hal tersebut ada beberapa pihak yang berpendapat perlu ditambah 2 elemen tambahan yaitu :

1. Keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi.
2. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata.

Manfaat implementasi value for money :

1. Meningkatkan pelayanan publik (Public Services)
2. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik, pelayanan tepat sasaran.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik (charging of public services) karena hilangnya pemborosan (inefisiensi) dan penghematan dalam penggunaan input.

PUBLIC SECTOR ACCOUNTING : DEFINITION



Akuntansi Sektor Publik dapat didefinisikan sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Public Sector Accounting juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan (*outcome*) barang dan pelayanan publik (*public service*) dalam rangka memenuhi kebutuhan hak publik

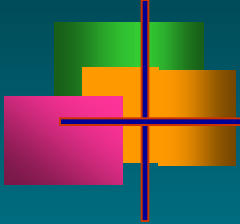
PUBLIC SECTOR ACCOUNTING : DEFINITION



American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan **pengendalian manajemen (*Management Control*)**.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan **akuntabilitas (*Accountability*)**

SCOPE OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING

- 
- Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik.
 - Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.
 - Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya : layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya : fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.
 - Organisasi Sektor Publik : bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence.

THE NATURE & CHARACTERISTICS OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING



Karakteristik Utama (Primary Characteristics) Organisasi Sektor Publik (Public Sector Organization) :

- Dijalankan tidak bermotif asi untuk mencari keuntungan (non profit motive), melainkan untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu.
- Dimiliki secara kolektif oleh publik.
- Kepemilikan atas sumber daya (resources) tidak digambarkan dalam bentuk saham sehingga tidak dapat diperjualbelikan
- Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi sering kali didasarkan pada kesepakatan / konsensus.

THE NATURE & CHARACTERISTICS OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING



Jenis-jenis Organisasi Sektor Publik :

- Instansi Pemerintah
 - Pemerintah Pusat : Kementrian, Lembaga / Badan Negara
 - Pemetintah Daerah : SKPD
- Organisasi Nir-laba (non profit) milik Pemerintah : Perguruan tinggi BHMN, RS milik pemerintah, Yayasan milik pemerintah.
- Organisasi Nir-laba Milik Swasta
- Yayasan swasta, sekolah dan universitas milik swasta, RS milik swasta.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

PUBLIC SECTOR ACCOUNTING : THE ENVIRONMENT FACTORS



A. FAKTOR EKONOMI (ECONOMIC FACTORS)

1. Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth)
2. Tingkat inflasi (Inflation rate)
3. Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
4. Struktur produksi (Production Structure)
5. Tenaga kerja (Employes)
6. Arus modal dalam negeri (Domestic Capital Flow)
7. Cadangan devisa
8. Nilai tukar mata uang (Currency Exchagne Rate)
9. Utang dan bantuan luar negeri
10. Infrastruktur (nfrastructure)
11. Teknologi (Technology)
12. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
13. Sektor informal (Informal Sector)

PUBLIC SECTOR ACCOUNTING : THE ENVIRONMENT FACTORS



B. FAKTOR POLITIK (POLITICAL FACTORS)

1. Hubungan negara dan masyarakat
2. Legitimasi pemerintah
3. Tipe rezim yang berkuasa
4. Ideologi negara
5. Elit politik dan massa
6. Jaringan internasional
7. Kelembagaan

PUBLIC SECTOR ACCOUNTING : THE ENVIRONMENT FACTORS



C. FAKTOR BUDAYA (CULTURAL FACTORS)

1. Keragaman suku, ras, agama, dan budaya
2. Sistem nilai di masyarakat
3. Historis
4. Sosiologi masyarakat
5. Karakteristik masyarakat
6. Tingkat pendidikan

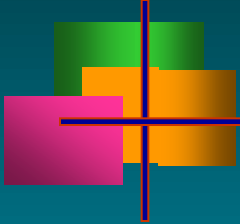
PUBLIC SECTOR ACCOUNTING : THE ENVIRONMENT FACTORS



B. FAKTOR DEMOGRAFI (DEMOGRAFIC FACTORS)

1. Pertumbuhan penduduk
2. Struktur usia penduduk
3. Migrasi
4. Tingkat kesehatan

THE SIMILARITIES OF PUBLIC SECTOR ORGANIZATION & PRIVATE SECTOR

- 
1. Merupakan bagian integral sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
 2. Menghadapi masalah kelangkaan sumber daya (*scarcity of resources*) yang sama, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif (3E).
 3. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama untuk kedua sektor tersebut; yaitu sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen.
 4. Terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang berlaku (disyaratkan).
 5. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan (Financial Position) dan hasil operasi (Operation Result).
 6. Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum; Objectivity, Consistency, Materiality, Full Disclosure.

PUBLIC SECTOR ORGANIZATION VS PRIVAT SEKTOR

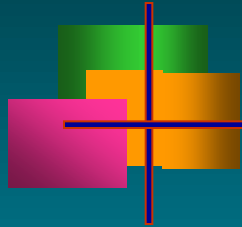
Perbedaan	Sektor Publik (Public Sector)	Sektor Swasta (Privat Sector)
Tujuan Organisasi	Nonprofit motif	Profit motif
Sumber pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb.	Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal: Utang bank, obligasi, penerbitan saham
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor

PUBLIC SECTOR ORGANIZATION VS PRIVAT SEKTOR



Perbedaan	Sektor Publik (Public Sector)	Sektor swasta (Privat Sector)
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, dan hierarkis	Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb.
Karakteristik anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi	Cash Accounting	Accrual Accounting

STAKEHOLDERS INTERNAL & EKSTERNAL PUBLIC SECTOR ORGANIZATION VS PRIVAT SECTOR



Sektor public	Sektor swasta / Privat
<p>Stakeholder Eksternal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - masyarakat pengguna jasa public - masyarakat pembayar pajak, - perus./organ social ekonomi yg menggunakan pelayanan public, - bank sbg kreditor peme-rintah, - badan-badan internasional, seperti IMF, ADB, PBB dsb. - Investor asing, dll. 	<p>Stakeholder eksternal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank sbg kreditor, - Serikat buruh, - Pemerintah, - Supplier, - Distributor, - Customer, - Masyarakat, - Pasar modal, dll.
<p>Stakeholder Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga negara (misal : Kabinet, MPR, DPR/DPRD, - Kelompok politik, - Manajer publik (gubernur, bupati, dir. BUMN/BUMD) - Pegawai pemerintah 	<p>Stakeholder internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen, - Karyawan, dan - Pemegang saham.



REFERENSI

Ekawanti, Wahyumi, *Pengantar Akuntansi Sektor Publik*, 2010,

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogya, 2009.

Renyo wijoyo, *Muindro, Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non-Laba*, Edisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.

Soeratno, *Modul Akuntansi Sektor Publik (Public Sector Accounting)*, 2009.

Ulum, Ihyaul, *Akuntansi Sektor Publik, Kerangka Umum ASP*, Chapter 1, 2004

UU, PP dan PSAK terkait.